

MAKALAH

Pendekatan Historis dalam Analisis dan Resolusi Konflik Etno-Religius melalui Studi Kasus Konflik Ambon 1999-2002

Disusun untuk memenuhi tugas

Mata Kuliah: Metodologi Ilmu Politik

Dosen: Dr. Firdaus Syam, MA



Disusun Oleh:

Kelompok 12

Miftahul Rahman Bahas (183112350150095)

Arfany Cahya Sakti (183112350150091)

Elmo Septian Rasyid (183112350150084)

Ainun Madian (193501526065)

Ismaun Ismail (183112350170099)

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Nasional

Kata Pengantar

Melihat konstalasi dalam dua dekade terakhir sejak peralihan dari pemerintahan Orde Baru, dan dimulainya demokratisasi dalam struktur politik pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Perhatian lebih terhadap penanganan konflik horizontal dalam basis masyarakat seperti tidak begitu mendapat perhatian yang lebih seperti yang seharusnya. Sejak peralihan hingga saat ini, kondisi dalam masyarakat Indonesia masih mudah untuk terjadinya pertentangan dan perdebatan yang berlandaskan pada identitas primordial, yang pada akhirnya pun digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Untuk itu, seiring dengan ditugaskannya kelompok kami – Kelompok 12 – dalam matakuliah Metodologi Ilmu Politik. Makalah ini disusun dengan upaya pembahasan dan pengamatan tentang kasus konflik horizontal yang telah terjadi sebelumnya, yaitu konflik di kepulauan Maluku, yang utamanya terjadi di Kota Ambon. Sehingga pada halaman-halaman berikutnya pembaca akan menemukan pembahasan konflik dan resolusi konflik, terkhususnya Konflik Etno-religius yang terjadi di Ambon.

Kurang lebihnya jika dalam penulisan dan penyusunan makalah ini ditemukannya salah kata, atau ditemukan pandangan yang berbeda, hal itu selebihnya adalah suatu yang wajar terjadi.

Jakarta, 8 April 2020

Kelompok 12

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan

Pembahasan

Pengertian Konflik Etno-Religius

Penanganan Konflik

Pendekatan Historis dalam melihat Konflik Etno-Religius

Kesimpulan

Daftar Pustaka

Pendahuluan

- **Latar Belakang**

Tahun-tahun peralihan Orde Baru menuju periode Reformasi ditandai dengan suatu konflik yang berdampak cukup besar pada stabilitas negara. Konflik yang terjadi di kepulauan maluku itu juga pada akhirnya mengubah hubungan sosial dan sruktur sosial Masyarakat di kepulauan Maluku selama ketegangan tersebut terjadi. Suatu peristiwa yang dalam prosesnya memakan banyak korban jiwa akibat konflik terbuka dan kekerasan yang terjadi. Konflik yang menurut Pieter Tanamal dan Lambang Trijono (Trijono, L(ed.). 2004) adalah salah satu konflik etno-religius dengan dampak terburuk yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Pada umumnya diketahui bahwa konflik tersebut merupakan akibat dari perselisihan antar masyarakat pendatang dan masyarakat setempat (masyarakat asli), dengan cepat konlfik tersebut ber-eskalasi menjadi konflik identitas yang mengubahnya menjadi perselisihan antara masyarakat beragama Islam melawan masyarakat beragama Kristen – yang pada akhirnya membagi masyarakat asli kedalam dua kubu.

Pada periode Orde Baru, sejak 1970, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan yang mempromosikan migrasi besar-besaran ke kepulauan Maluku, masyarakat dengan latar belakang bugis, buton, jawa, tionghoa dan lain sebagainya pada dekade-dekade berikutnya bertangan dan menduduki kepualauan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak hanya mengakibatkan perubahan pada sektor kependudukan belaka, pemerintah pun juga memberlakukan berbagai kebijakan lainnya yang mempromosikan sektor ekonomi bagi para pendatang

dan masyarakat dengan latar belakang islam sebagai kepercayaan mereka.¹ Hal-hal ini pada tahapan berikutnya menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat setempat, terutama mereka yang beragama Kristen, dan pada akhir periode Orde Baru, pada saat krisis ekonomi melanda dan disertai oleh peristiwa yang tidak begitu signifikan – namun karena keberadaan ketegangan yang telah terbangun sejak beberapa dekade tersebut – ketegangan beranjak menjadi suatu konflik terbuka yang pada akhirnya memicu suatu ketegangan identitas agama. Eskalasi tersebut dengan cepat menyebar di seluruh kepulauan Maluku, termasuk kepulauan Maluku Utara. Selain itu, percikan-percikan perselisihan identitas agama juga muncul di beberapa daerah diluar kepulauan Maluku sebagai akibat dari konflik yang terjadi.²

Letusan kekerasan yang terjadi dimana-mana di kepulauan Maluku, terutamanya kota Ambon, tidak hanya mengakibatkan munculnya korban jiwa dan segregasi sosial antar umat beragama. Namun, dilain sisi, konflik yang terjadi ini semakin melumpuhkan roda perekonomian masyarakat setempat. Dengan terjadinya kekerasan dimana-mana orang-orang enggan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di ruang-ruang terbuka, kota Ambon yang telah menjadi kota multikultural merupakan tempat yang rentan bagi individu-individu yang dapat kapan saja menjadi target kekerasan akibat perbedaan identitas tersebut. Akibatnya berbagai pusat perekonomian menjadi mati. Selain itu, pengrusakan infrastruktur yang dilakukan oleh kedua belah pihak juga terjadi.³

Penanganan terhadap konflik yang terjadi di Kepulauan Maluku (terutama kota Ambon), tidak berjalan begitu lancar. Ini terlihat dari bagaimana konflik tersebut meluas dan memakan waktu yang cukup lama untuk mereda. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak begitu efektif pada awal mulanya konflik

¹ Trijono, L., Tanamal, P. *Religious Conflict in Maluku: In search of Religious Community Peace* in Trijono, L. (ed.). *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Case and Resolutions* (Yogyakarta: CSPA BOOKS, 2004), hal 231.

² *Ibid*, Hal 232.

³ Purwanti, P. 2018. Dampak Konflik Ambon 1999 Yang Menyita Perhatian Dunia. <https://hukamnas.com/dampak-konflik-ambon-1999> (8 April 2020).

meletus. Walau konflik ini dapat dikatakan telah berlalu cukup lama, namun kasus ini menunjukkan suatu konflik yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian lebih.

- **Rumusan Masalah**

Konflik bukanlah suatu fenomena yang statis. Ia bersifat ekspresif, dinamis, dan dialektis. Konflik etno-religius tidak jauh berbeda. Lalu bagaimana kita dapat memahami apa itu konflik etno-religius? Apa itu konflik etno-religius sebenarnya? Bagaimana konflik tersebut dapat terjadi? Bagaimana penanganan terhadap konflik semacam itu? Dan bagaimana dapat mewujudkan masyarakat plural yang harmonis?

- **Tujuan**

Tujuan Makalah ini adalah untuk menjawab segala pertanyaan diatas, melalui penjelasan terhadap konflik etno-religius, penanganan konflik dan resolusi yang dapat dilakukan untuk mengakhiri atau mentransformasi konflik agar terwujudnya perdamaian dalam tatanan masyarakat yang beragam.

II

Pembahasan

- Pengertian Konflik Etno-Religius

Konflik Etno-Religius adalah fenomena perselisihan yang terjadi antar dua kubuh yang terbagi atas identitas primordial yang melekat pada kelompok-kelompok yang terlibat didalamnya. Istilah etnis dan konflik etnis sering digunakan dalam perspektif yang berbeda-beda. Penglihatan terhadap konflik yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula akan memaknai etnis dan konflik etnis secara berbeda pula. Secara sempit etnis atau etnisitas ditujukan untuk kelompok dengan ras dan geneologi, atau bahasa yang sama. Secara lebih luas etnis dapat diartikan sebagai kelompok dengan identitas yang sama, identitas primordial seperti ras, bahasa, agama, atau adat. Artinya etnisitas merupakan istilah yang menandai suatu rasa kesamaan identitas oleh individu-individu dalam suatu kelompok.⁴ Dalam masyarakat multietnik kekerasan dan konflik merupakan sesuatu yang dapat terjadi, baik itu antar masyarakat atau dengan otoritas pemerintahan. Namun suatu konflik tidak serta merta berarti kekerasan, suatu kelompok etnisitas tertentu dapat melakukan protes terhadap kebijakan yang menyangkut identitas mereka yang memicu terjadinya perselisihan antar masyarakat dan pemerintahan. Konflik terjadi akibat segregasi atau pengesampingan terhadap keberadaan “identitas” yang dimiliki masyarakat tersebut. Politik dan socio-kultural dalam suatu masyarakat sangat menentukan terjadi atau tidaknya konflik.

- **Penanganan Konflik**

Ketika telah terjadi suatu konflik etnis dan religius, tidak mudah untuk menanganinya, hal ini dikarenakan utamanya oleh isu-isu yang bersifat multidimensional, tidak hanya tentang kepentingan melainkan juga tentang keberadaan identitas yang bersangkutan.⁵ Penanganan konflik adalah suatu upaya untuk mencari akar permasalahan dan juga menangani konflik yang telah atau dapat terjadi sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik bagi kelompok-kelompok yang terlibat. Utamanya penanganan konflik dilakukan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan fisik dsb. Penanganan Konflik dibagi dalam tiga mekanisme, yaitu;

⁴ Trijono, L (ed.). *Introduction in The Making of Ethnic and Religious Conflict in Southeast Asia: Cases and Resolution* (Yogyakarta: CSPA BOOKS, 2004). Hal 2-5.

⁵ *Ibid*, Hal 6.

mekanisme manajemen konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik.⁶

Mekanisme manajemen konflik bertumpu pada kemampuan penegakkan peningkatan keamanan seperti menggunakan kekuatan militer, kepolisian, kebijakan-kebijakan pengamanan dsb, untuk menjaga agar konflik tidak meningkat atau untuk menurunkan tensi yang telah muncul diantara masyarakat. Mekanisme resolusi konflik adalah upaya pencarian solusi untuk mencari resolusi yang tepat. Mekanisme transformasi adalah upaya untuk mengubah alur konflik yang terjadi, melalui advokasi, rekonsiliasi, dan merubah titik perhatian konflik. Agar identitas yang berbeda-beda dapat akhirnya rukun dalam suatu masyarakat, diperlukan resolusi yang dapat memberikan perasaan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Agar hal itu dapat terjadi penemuan akar permasalahan pertikaian dan perselisihan harus ditemukan sebelum konflik meletus menjadi kekerasan.

- **Pendekatan Historis dalam melihat konflik Etnoreligius**

Identitas merupakan suatu hasil kultural suatu masyarakat, yang melalui sejarah perkembangannya membangun adat dan kebiasaan-kebiasan yang mengakar pada kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut kemudian dapat menentukan interaksi masyarakat tersebut dengan kelompok dengan identitas yang berbeda, koeksistensi pun terjadi karena penemuan atau pembangunan akulturasi antar dua kelompok yang berbeda. Untuk memahami dinamika konflik konstalasi relasi antar kelompok identitas dalam masyarakat perlu dimengerti, Lambang Trijono menyebutkan ada dua tipe relasi antar kelompok, yaitu relasi simetris dan relasi asimetris. Relasi simetris merupakan keberadaan koeksistensi, kooperasi, ketergantungan, kompetisi dan konflik. Relasi asimetris adalah bentuk relasi dominasi atau super-ordinan dan

⁶ *Ibid*, Hal 7.

subordinan, yang mana kelompok mayoritas mendominasi kelompok minoritas.⁷

- **Analisis Konflik Ambon dan Kepulauan Maluku**

Konflik yang meletus di Ambon yang pada akhirnya menyebar di seluruh kepulauan maluku dan beberapa daerah lainnya bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, namun akar permasalahan dari konflik ini telah tertanam dalam fakta struktural hubungan antar kelompok etnis dan agama dari dulu hingga sekarang. Ketegangan yang muncul melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dari 1970-an hingga jatuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta muncul dari permukaan begitu saja. Penolakan atas kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat oleh kelompok termarginalisasi pada periode itu (kelompok etnis maluku Kristen) dan dukungan terhadapnya oleh kelompok yang dipromosikan (etnis maluku Islam dan kelompok pendatang) adalah suatu akibat dari relasi terdahulu yang telah dibangun sebelumnya. Pada periode Orde Baru, hubungan asimetris yang didominasi kelompok Islam (masyarakat pendatang maupun asli) atas kelompok Kristen adalah suatu pembalikan hubungan antar kedua kelompok tersebut dari periode sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejak kolonialisasi belanda dimulai dan kemunculannya masyarakat asli maluku yang memeluk agama Kristen melalui missionary-missionary belanda, kedudukan masyarakat muslim dimarginalkan melalui kebijakan-kebijakan kolonial, dan penolakan masyarakat tersebut sendiri. Masyarakat Maluku pada periode kolonial dibagi menjadi dua, yaitu *Negeri Salam* (Kelompok masyarakat Muslim) dan *Negeri Sarani* (Kelompok masyarakat Kristen). Pembagian ini menjadikan wilayah-wilayah dikepulauan Maluku terbagi secara religius-teritorial, yang melepaskan identitas kebudayaan dari pembagian administratif wilayah.⁸

⁷ Trijono, L. *Structural-Cultural Dimensions of Ethnic Conflict: Towards a Better Understanding and Appropriate Solution in Managing Ethnic Conflict* in Trijono, L.(ed.) *The Making of Ethnic & Religious Conflict in Southeast Asia: Cases and Resolutions* (Yogyakarta: CSPA BOOKS, 2004). Hal 30-31.

⁸ Trijono, L., Tanamal, P. *Religious Conflict in Maluku: In search of Religious Community Peace* in Trijono, L. (ed.). *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Case and Resolutions* (Yogyakarta:

Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat di kepulauan maluku secara politik-teritorial terbagi dalam *Negeri-Negeri* yang dikuasai oleh *Raja-Raja*. Namun kuasa para *Raja* ini hanyalah suatu kuasa politik semata, hal ini karena masyarakat terbagi atas suku-suku (*klan*) yang dipimpin oleh para *Pati*, suatu *Negeri* adalah pembentukan Konsensus para *Pati* dalam suatu teritorial tertentu, sehingga dalam kondisi masyarakat dengan *klan-klan* yang berbeda-beda seorang *Raja* tidak memiliki banyak kuasa atas masyarakat *klan* yang berbeda darinya. Kedatangan Belanda mengubah struktur sosial yang telah terbangun tersebut, untuk pengendalian yang lebih mudah, pemerintahan Kolonial mengutamakan kuasa penuh pada para *Raja-Raja*, dan munculnya identitas baru (Kristen) mempermudah administrasi wilayah tersebut. Segregasi pada masyarakat Negeri Salam meruntuhkan struktur sosio-kultural sebelumnya dan menggantinya dengan struktur yang berbasis agama.⁹

Dengan penarikan kekuasaan kolonial Belanda dari tanah Maluku, lalu dimasukkannya kedalam Republik Indonesia, mendapati perlawanan dari masyarakat *Negeri Sarani* yang selama era penjajahan menjadi pihak yang dipromosikan oleh pemerintahan, yang direalisasikan melalui suatu perlawanan terbuka – pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sebaliknya, masuknya Maluku dalam Republik Indonesia mendapat dukungan dari masyarakat *Negeri Salam*, hal ini utamanya karena pandangan mereka terhadap pihak kolonial sebagai pemerintahan kafir sehingga Indonesia adalah pilihan yang lebih baik. Setelahnya kedudukan sosial antar kedua kelompok mulai berganti secara perlahan pada periode pemerintahan Soeharto.

Pembagian kedua kelompok dan keberpihakan pada yang satu pada satu tahapan, dan yang lain pada tahapan berikutnya menambahkan pembedaan kedua kelompok

CSPS BOOKS, 2004), hal 234.

⁹ Ibid, Hal 233.

yang sebenarnya memiliki akar etnisitas dan kebudayaan yang sama. Hingga meletusnya kekerasan kedua kelompok ini, secara sosiologis, telah membentuk pandangan terhadap kelompok lainnya secara sinikal akibat perbedaan identitas kepercayaan yang dianut.

Masyarakat Maluku mengenal suatu mekanisme integrasi dalam sistem tradisional *Pela* dan *Gandong*, yang dapat mencegah potensi konflik. *Pela* adalah hubungan antar kelompok etnisitas dan religius yang terikat dalam satu atau lebih *Negeri Salam* dan *Negeri Sarani* berdasarkan kesepakatan layaknya kontrak sosial untuk tidak saling melakukan kekerasan. Dan *Gandong* adalah relasi sosial yang menjembatani perbedaan keagamaan berdasarkan kesamaan geneologis (turunan/klan). Namun, mekanisme ini hanya dapat menjadi penyelesaian bagi masyarakat maluku yang memiliki perselisihan, dan tidak dapat diberlakukan bagi masyarakat pendatang. Oleh karenanya, dalam penyelesaian konflik etno-religius dibutuhkan suatu jembatan yang melampaui hubungan identitas yang membedakan setiap kelompok yang terlibat. Peredaan konflik dapat dilakukan melalui metode dialog, dari pemuka setiap kelompok yang terlibat untuk meredakan konflik yang telah terjadi.¹⁰

Suatu resolusi yang lebih tepat adalah perubahan kebijakan dan penyetaraan melalui mekanisme politik untuk menghilangkan segregasi dan kesenjangan yang dirasakan. Dalam melakukan hal ini, terutama dalam masyarakat multi-identitas diperlukan perlakuan pembatasan-pembatasan terhadap dominasi satu kelompok, dan penyamarataan secara sosio-ekonomis. Tentu permasalahan yang muncul adalah bagaimana jika kasus yang terjadi tidak seperti yang terjadi di Ambon/Maluku. Tentu dalam kasus yang berbeda, maka harus diberlakukan melalui analisis yang berbeda pula, dengan melihat terhadap aspek sosio-kultural dan sejarah perkembangan masyarakat tersebut.

¹⁰ Ibid, Hal 236-249.

Setiap konflik yang terjadi, adalah akibat dari keresahan yang dirasakan dalam hubungan sosial yang dijalani oleh suatu kelompok, maka titik permasalahan selalu bertumpu pada mengapa keresahan tersebut dapat terjadi. Walau kasus Ambon adalah satu kasus dalam satu konteks yang sulit di samakan dengan yang lainnya, namun inti bagaimana permasalahan tersebut muncul pada perairan dikarenakan oleh perbedaan yang terjadi berdasarkan identitas. Dan jembatan yang dapat menghubungkan semua akar permasalahan ketegangan dan yang pada akhirnya dapat menjadi konflik etno-religius adalah melihat kondisi sosio-ekonomis kelompok identitas yang dapat memicu terjadinya konflik.

III

Kesimpulan

Eskalasi Konflik dan pengelompokan kelompok oleh masyarakat itu sendiri merupakan suatu akibat perbedaan kepentingan antar kelompok yang dirugikan, dalam kasus Ambon/Maluku, kedua kelompok dalam sejarah perkembangannya telah secara masing-masing mengalami periode segregasi secara otoritatif-administratif yang berujung pada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terbangun lama inilah yang memicu bagaimana dapat terjadinya suatu konflik. Kesenjangan sosial tersebut secara psikologis dirasa merupakan perbedaan terhadap identitas tertentu yang dimilikinya, yang mengakibatkan pandangan sosiologis bahwa kelompok dengan identitas tersebut tidak diinginkan atau dirugikan. Oleh karenanya dalam pencarian resolusi konflik atau pencegahan konflik hal ini merupakan suatu yang perlu untuk diidentifikasi, yang dengan sendirinya tidak hanya dapat dilihat dari keadaan sesaat dalam keadaan konflik, melainkan suatu yang harus ditelusuri dalam hubungan yang terbangun dalam masyarakat yang terlibat tersebut.

Penanganan konflik secara reaksioner belaka tidak akan menjamin tidak dapat terjadinya konflik berikutnya, baik oleh kelompok identitas yang sama, ataupun kelompok lain yang dalam prosesnya merasa dirugikan atau dikesampingkan.

Daftar Pustaka

Buku

Trijono, L. (ed.). 2004. *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia: Cases and Resolutions*. Yogyakarta: CSPA BOOKS.

Trijono, L. *Structural-Cultural Dimensions of Ethnic Conflict: Towards a Better Understanding and Appropriate Solution in Managing Ethnic Conflict*, Hal 23-44.

Trijono, L., Tanamal, P. *Religious Conflict in Maluku: In search of Religious Community Peace*, Hal 231-256.

Boix, C., Stokes, Susan C. (ed.). 2007. *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. New York: Oxford University Press Inc.

Varshney, A. *Ethnicity and Ethnic Conflict*, Hal 274-292.

Internet

Purwanti, P. 2018. Dampak Konflik Ambon 1999 Yang Menyita Perhatian Dunia. <https://hukamnas.com/dampak-konflik-ambon-1999> (8 April 2020).